

UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH: UPAYA MENCARI TITIK TEMU DALAM MENJAWAB TANTANGAN ISLAM GLOBAL KONTEMPORER

Nur Aiman¹

¹UIN Sunan Kalijaga

Email: nuraimans.017@gmail.com

Abstrak: Perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada ketidakterpaduan pelaksanaan ibadah umat Islam secara global. Ketidaksepakatan antara metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan hilal), serta tidak adanya otoritas keagamaan yang diakui secara universal, kerap mengakibatkan perbedaan dalam penentuan hari besar keagamaan seperti Idulfitri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana unifikasi kalender diposisikan sebagai solusi strategis atas problem simbolik dan praktis umat Islam global, serta mengungkap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kalender Hijriah terpadu. Kajian sebelumnya lebih banyak membahas terkait unifikasi kalender hijriah secara umum namun dalam kajian ini lebih kepada upaya mencari titik temu dalam menjawab tantangan Islam global terkait unifikasi kalender hijriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis tantangan dan peluang unifikasi kalender Hijriah dalam konteks Islam global kontemporer. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan dinamika politik, legitimasi otoritas keagamaan, serta simbolisasi identitas kolektif umat. Upaya institusional yang telah dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan forum MABIMS menunjukkan kemajuan konseptual, namun belum terimplementasi secara luas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa unifikasi kalender Hijriah memiliki potensi besar sebagai simbol persatuan umat, jika disertai dengan kolaborasi lintas otoritas keilmuan dan keagamaan. Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keselarasan ibadah dan memperkuat solidaritas umat Islam di tengah tantangan globalisasi.

Kata Kunci: Kalender Hijriah, Hisab dan Rukyat, Kekuasaan Keagamaan, Persatuan Umat Islam.

Abstract: The divergence in determining the beginning of Hijri months remains a significant issue affecting the uniformity of Islamic worship practices worldwide. The lack of consensus between the methods of hisab (astronomical calculation) and rukyat (moon sighting), as well as the absence of a universally recognized religious authority, often

leads to differences in the observance of Islamic holy days such as Eid al-Fitr. This study employs a qualitative approach through library research to analyze the challenges and opportunities of Hijri calendar unification in the context of contemporary global Islam. The findings indicate that the problem is not merely technical or astronomical, but deeply rooted in political dynamics, religious authority, and symbolic expressions of Muslim identity. Institutional efforts initiated by the Organization of Islamic Cooperation (OIC) and the MABIMS forum have made some progress, although implementation remains limited. This study concludes that the unification of the Hijri calendar holds great potential as a unifying symbol for the Muslim ummah, provided it is supported by collaborative efforts among scholars, religious leaders, and national authorities. Such unification is essential as a strategic step toward fostering ritual harmony and reinforcing global Islamic solidarity.

Keywords: *Hijri Calendar, Hisab And Rukyat, Religious Authority, Muslim Unity.*

PENDAHULUAN

Perbedaan dalam penetapan kalender Hijriah masih menjadi persoalan sosial dan keagamaan yang memicu ketidakseragaman ibadah umat Islam secara global. Hal ini disebabkan belum adanya kesepakatan metode penentuan awal bulan, antara hisab dan ru'yat, serta tidak adanya otoritas tunggal yang diakui dunia Islam.¹ Akibatnya, terjadi perbedaan hari besar seperti Idulfitri, misalnya pada 2023 Indonesia merayakannya 21 April, sementara Arab Saudi pada 20 April. Fenomena ini menimbulkan kebingungan dan mengurangi makna simbolik persatuan umat. Upaya unifikasi seperti Konferensi Internasional Kalender Hijriah oleh OKI pada 2016 telah dilakukan, namun belum diterapkan luas. Faktor politis dan kemandirian otoritas keagamaan menjadi tantangan besar. Di Indonesia, perbedaan metode antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memperjelas kompleksitas ini. Maka, unifikasi kalender Hijriah bukan sekadar teknis astronomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, keagamaan, dan politik. Diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak. Tanpa itu, umat Islam akan terus menghadapi fragmentasi simbolik dalam praktik keagamaannya.²

¹ Sumber Pengetahuan, "Dinamika Rukyat Dan Hisab Dalam Penentuan Bulan Hijriah Menurut Muhammadiyah" 06, no. 3 (2024): 243–57.

² Anis Fatimah and S Pd Dewi, "Pandangan Muhammadiyah Dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri" (IAIN Surakarta, 2020).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Unifikasi Kalender Hijriah, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mufid (2019)³ yang berjudul Unifikasi Kalender Hijriah Internasional dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawi, dalam penelitiannya pemahaman Yusuf alQaradawi tentang rukyat hilal adalah harapan al-Qaradawi secara mendesak atas terwujudnya penyatuan puasa dan hari raya kaum muslimin di Eropa dengan beberapa alasan yang di antaranya adalah karena minoritas umat Islam di sana, bukan penyatuan seluruh kaum muslimin di muka bumi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam permasalahan utama yang menghambat unifikasi kalender Hijriah dalam konteks tantangan Islam global kontemporer. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan perbedaan penetapan kalender Hijriah di berbagai negara Islam, dengan menyoroti peran otoritas keagamaan serta pendekatan metode hisab dan ru'yat yang kerap menjadi sumber perbedaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi upaya-upaya institusional yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Forum MABIMS dalam mendorong penyatuan kalender Hijriah, serta menganalisis tantangan-tantangan teologis, politis, dan praktis yang menghambat implementasi kalender Hijriah global sebagai simbol kesatuan umat Islam.

Unifikasi kalender Hijriah perlu diuji keabsahan pengaruhnya karena upaya ini bukan sekadar proyek teologis atau astronomis, melainkan strategi simbolik yang mengklaim mampu menjawab tantangan Islam global kontemporer, khususnya dalam memperkuat persatuan umat dan menyelaraskan pelaksanaan ibadah lintas negara. Pengujian ini penting untuk menilai apakah unifikasi benar-benar berdampak pada penguatan kohesi sosial-keagamaan umat Islam atau justru hanya menjadi wacana idealistik yang belum menyentuh akar persoalan di lapangan. Ketidaksamaan penetapan hari raya yang berulang setiap tahun menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan di tengah umat, sehingga unifikasi kalender dianggap sebagai solusi strategis. Namun, sejauh mana solusi ini diterima oleh otoritas agama, negara, dan masyarakat luas masih

³ Abdul Mufid, "Unifikasi Kalender Hijriah Internasional Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawi," *Hikmatuna* 5, no. 1 (2019): 71–83.

belum terbukti secara empiris. Oleh karena itu, pengujian keabsahan pengaruh diperlukan agar gagasan unifikasi tidak hanya tepat secara konsep, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam memperkuat solidaritas dan efektivitas koordinasi umat Islam di era global.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menggali dan menganalisis wacana unifikasi kalender Hijriah dalam menjawab tantangan Islam global kontemporer. Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, yang relevan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2025). Sumber-sumber tersebut meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi (nasional terindeks SINTA dan internasional bereputasi), buku kajian keislaman, dokumen kebijakan dari lembaga seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan MABIMS, serta fatwa dan pernyataan resmi dari ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi argumen, konsep, dan pendekatan yang muncul dalam literatur mengenai unifikasi kalender Hijriah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana unifikasi kalender diposisikan sebagai solusi strategis atas problem simbolik dan praktis umat Islam global, serta mengungkap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kalender Hijriah terpadu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menggali dan menganalisis wacana unifikasi kalender Hijriah dalam menjawab tantangan Islam global kontemporer. Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, yang relevan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2025). Sumber-sumber tersebut meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi (nasional terindeks SINTA dan internasional bereputasi), buku kajian keislaman, dokumen kebijakan dari lembaga seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan MABIMS, serta fatwa dan pernyataan resmi dari ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan

menginterpretasi argumen, konsep, dan pendekatan yang muncul dalam literatur mengenai unifikasi kalender Hijriah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana unifikasi kalender diposisikan sebagai solusi strategis atas problem simbolik dan praktis umat Islam global, serta mengungkap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kalender Hijriah terpadu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kalender Hijriah dan Perannya dalam Islam

a. Sejarah dan Fungsi kalender Hijriah

Dimulai sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, digunakan untuk ibadah dan hukum Islam. Kalender Hijriah ditetapkan berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah sebagai penanda awal sistem penanggalan Islam yang mencerminkan nilai spiritual dan historis umat Muslim. Alasan utama penggunaan kalender ini adalah untuk menyeragamkan pencatatan waktu dalam konteks administrasi negara Islam, pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadhan, haji, zakat, dan penentuan masa iddah, serta aspek hukum lainnya yang bergantung pada ketetapan waktu. Sebagai bukti, berbagai ayat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah menekankan pentingnya mengenal bulan-bulan Hijriah dalam menjalankan syariat.⁴ Dengan demikian, kalender Hijriah bukan hanya sistem penanggalan biasa, melainkan instrumen penting yang merekatkan dimensi spiritual, sosial, dan hukum dalam kehidupan umat Islam sejak masa awal peradaban Islam.

Seiring berjalannya waktu, fungsi kalender Hijriah tetap relevan, namun tantangan muncul ketika umat Islam tersebar di berbagai wilayah dengan perbedaan geografis, metode penetapan awal bulan, serta otoritas keagamaan yang beragam. Hal ini menyebabkan ketidaksamaan dalam pelaksanaan ibadah, khususnya yang berbasis waktu seperti Ramadhan dan Idul Fitri, yang justru mengaburkan semangat awal penetapan kalender sebagai alat pemersatu umat.⁵ Selain itu, dalam konteks

⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 122.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Balitbang Depag, 2002), QS. At-Taubah [9]: 36.

globalisasi dan kemajuan ilmu astronomi, muncul kebutuhan untuk menyesuaikan sistem penanggalan ini agar tetap akurat, dapat diterima lintas negara, dan mampu menjawab kebutuhan umat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syar'i. Oleh karena itu, memahami sejarah dan fungsi kalender Hijriah menjadi dasar penting dalam membangun kesadaran kolektif umat Islam untuk memperjuangkan unifikasi kalender sebagai bagian dari revitalisasi peradaban Islam yang adaptif, terarah, dan bersatu.

Upaya ini tidak lepas dari tantangan besar yang melekat pada sifat kalender Hijriah itu sendiri yang berbasis lunar (bulan), yang menjadikannya sangat tergantung pada visibilitas hilal untuk menentukan awal bulan. Dalam praktiknya, terjadi perbedaan pendekatan antara metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan langsung bulan sabit), yang sering kali menghasilkan hasil yang tidak seragam antarnegara maupun antarotoritas keagamaan. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perbedaan cara pandang dalam memahami otoritas keilmuan dan sumber hukum Islam.⁶ Ketegangan antara hisab dan rukyat inilah yang menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan kalender Hijriah yang unifikatif, sehingga diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan akurasi sains modern dengan nilai-nilai syariah, demi menciptakan sistem penanggalan Islam yang konsisten dan mampu menjawab tantangan global umat saat ini.

Lebih dari sekadar alat pencatat waktu, kalender Hijriah juga berfungsi sebagai simbol spiritual dan sosial yang merekatkan identitas kolektif umat Islam. Setiap penanda waktu dalam kalender ini, seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, mengandung makna keagamaan yang mendalam serta menjadi momen kebersamaan dan solidaritas umat di seluruh dunia. Oleh karena itu, ketidakseragaman dalam menetapkan awal bulan tidak hanya berdampak pada aspek teknis ibadah, tetapi juga mengganggu kesatuan makna spiritual dan momentum sosial yang seharusnya dirayakan secara bersama. Dengan demikian, unifikasi

⁶ Thomas Djamaluddin, "Penyatuan Kalender Hijriah Global: Tantangan dan Peluang", *Jurnal Falak*, Vol. 15, No. 1, 2021.

kalender Hijriah bukan sekadar persoalan akurasi astronomis, tetapi juga menyangkut upaya menjaga simbol kolektif umat Islam yang merepresentasikan persatuan, identitas, dan keberlangsungan tradisi keislaman dalam ruang global yang semakin kompleks.

2. Perbedaan Penetapan Idul Fitri 1446 H: Kasus Tahun 2025

a. Fakta perbedaan penetapan

Arab Saudi dan sebagian negara merayakan Idul Fitri pada 30 Maret 2025, sedangkan negara lain, termasuk Indonesia, menetapkan 1 Syawal jatuh pada 31 Maret 2025. Perbedaan ini menyoroti persoalan lama yang belum terselesaikan, yakni ketidaksepakatan dalam metode penentuan awal bulan Hijriah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kriteria yang berbeda dalam melihat atau menghitung hilal: Arab Saudi cenderung menggunakan metode rukyat lokal yang memungkinkan penetapan lebih awal, sementara Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara mengacu pada kriteria visibilitas hilal yang lebih ketat berdasarkan kesepakatan regional seperti MABIMS.⁷ Contoh ini memperkuat argumen bahwa perbedaan kalender tidak semata soal perbedaan geografis, tetapi juga terkait perbedaan otoritas, pendekatan keilmuan, dan kebijakan negara. Ketika umat Islam merayakan hari besar keagamaan pada tanggal yang berbeda, makna kolektif dan simbol kebersamaan yang terkandung dalam Idul Fitri menjadi terfragmentasi. Dengan demikian, kasus Idul Fitri 1446 H mencerminkan pentingnya mencari solusi bersama atas perbedaan ini, agar kalender Hijriah dapat berfungsi sebagai alat pemersatu, bukan pemisah, dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam global.

b. Faktor penyebab

Perbedaan penetapan awal bulan Hijriah, seperti yang terjadi pada Idul Fitri 1446 H, tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor mendasar yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan metodologi antara rukyat

⁷ Bashori Alwi, Co Promotor, and H Imam Yahya, "Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu," *Doctoral, Semarang, UIN Walisongo*, 2020.

(pengamatan langsung hilal) dan hisab (perhitungan astronomis), di mana masing-masing metode memiliki landasan teologis dan historis yang kuat, serta dipegang teguh oleh otoritas keagamaan di berbagai negara. Selain itu, belum adanya lembaga otoritatif berskala global yang memiliki legitimasi untuk menetapkan awal bulan Islam menambah kompleksitas persoalan ini, sebab setiap negara merasa berhak mempertahankan otoritasnya sendiri.⁸ Di sisi lain, kepentingan geopolitik dan sentimen nasionalisme agama juga memperkuat fragmentasi, di mana keputusan-keputusan keagamaan, termasuk penetapan 1 Syawal, turut dijadikan instrumen afirmasi identitas negara atau kelompok tertentu. Parahnya, hal ini menciptakan jarak psikologis dan sosial antarumat Islam lintas negara, karena momen-momen spiritual seperti Idul Fitri yang seharusnya menjadi simbol persatuan justru dirayakan dalam perbedaan. Oleh karena itu, problematika unifikasi kalender Hijriah memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran kolektif umat Islam untuk melihat kalender sebagai medium kesatuan simbolik dan praktis, serta memperkuat kerja sama antarnegara Muslim demi menghadirkan wajah Islam yang lebih harmonis dan terkoordinasi secara global.

c. Dampak sosial dan keagamaan

Perbedaan penetapan awal bulan Hijriah, khususnya dalam momentum penting seperti Idul Fitri, berdampak langsung pada kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam. Salah satu dampak utama adalah munculnya kebingungan di kalangan masyarakat awam yang tidak memahami perbedaan metodologi penentuan bulan. Ketika dalam satu lingkungan atau bahkan satu keluarga terjadi perbedaan hari dalam melaksanakan salat Id atau berpuasa, hal ini tidak hanya menimbulkan keraguan dalam menjalankan ibadah, tetapi juga mengurangi kekhusyukan dan nilai spiritual dari perayaan tersebut.⁹ Fragmentasi praktik keagamaan juga terlihat jelas di tingkat global, ketika umat Islam tidak lagi

⁸ Maimun Maimun, "Rekonstruksi Konsep Ijmak Dalam Berijtihad Di Era Modern," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2018): 379376.

⁹ Suhanah Suhanah, "Dampak Sosial Perbedaan Pendapat Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam Di Kota Semarang," *Harmoni* 11, no. 2 (2012): 156–68.

merayakan hari besar secara serentak, sehingga mengaburkan simbol kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah yang selama ini menjadi identitas kolektif umat. Lebih jauh lagi, kondisi ini memunculkan dilema dalam upaya menjaga kesatuan umat, karena perbedaan yang terus terjadi setiap tahun memberi kesan bahwa umat Islam tidak mampu bersatu bahkan dalam hal-hal yang mendasar. Dengan demikian, dampak perbedaan kalender Hijriah tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga mengganggu integrasi sosial dan spiritual umat Islam, sehingga menjadi urgensi bersama untuk mencari jalan keluar melalui pendekatan yang ilmiah, inklusif, dan berorientasi pada persatuan.

3. Gagasan dan Inisiatif Unifikasi Kalender Hijriah Global

a. Upaya sebelumnya:

Selama beberapa dekade terakhir, berbagai pihak telah mengusulkan inisiatif untuk menyatukan penanggalan Hijriah secara global, dengan harapan dapat mengatasi perbedaan yang terus berulang dalam penentuan awal bulan. Salah satu upaya paling signifikan datang dari Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang sejak tahun 1980-an telah menggagas pembentukan kalender Islam terpadu berbasis metode hisab dan kriteria astronomis internasional. Selain OKI, negara-negara seperti Turki dan beberapa negara di Timur Tengah juga telah memperkenalkan model kalender Hijriah permanen yang dikembangkan melalui pendekatan ilmiah, dengan data visibilitas hilal yang dikalkulasi secara global. Alasan utama dari inisiatif ini adalah untuk menghadirkan kepastian dalam ibadah umat Islam serta menyelaraskan pelaksanaan ibadah kolektif lintas negara, seperti puasa Ramadhan dan Idul Fitri.¹⁰ Sebagai contoh, Turki telah menggunakan kalender Hijriah berdasarkan hisab global selama bertahun-tahun dengan konsistensi, yang menunjukkan bahwa sistem ini dapat diterapkan secara efektif. Namun demikian, keberhasilan implementasi kalender terpadu masih terhambat oleh rendahnya tingkat penerimaan di negara-negara lain yang masih mengutamakan rukyat lokal.

¹⁰ Abdul Mu'ti, "Toleransi Yang Otentik: Menghadirkan Nilai Kemanusiaan Dan Keterbukaan Dalam Beragama, Berpolitik Dan Peradaban Global," 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun gagasan unifikasi telah ada dan didukung oleh kajian ilmiah, realisasi globalnya membutuhkan kesepakatan politik dan keagamaan yang luas. Oleh karena itu, inisiatif tersebut menjadi fondasi penting untuk langkah-langkah lanjutan, sekaligus membuktikan bahwa unifikasi kalender Hijriah bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan membutuhkan komitmen kolektif yang berkelanjutan.

b. Peran institusi Islam besar

Dalam dinamika unifikasi kalender Hijriah, peran institusi Islam besar menjadi sangat strategis karena mereka memiliki pengaruh keagamaan, sosial, dan politik yang luas di tengah umat. Organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia, Al-Azhar di Mesir, serta Rabithah al-Alam al-Islami (Liga Dunia Islam) di Arab Saudi memiliki otoritas moral dan intelektual yang diakui tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.¹¹ Muhammadiyah, misalnya, telah lama mendorong penggunaan hisab hakiki wujudul hilal yang konsisten, sementara NU tetap mempertahankan rukyat sebagai metode utama, namun keduanya terus terlibat aktif dalam dialog keagamaan nasional yang inklusif. Al-Azhar, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh, memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan antara pendekatan tekstual dan rasional dalam menetapkan awal bulan, sedangkan Rabithah al-Alam al-Islami telah terlibat dalam berbagai forum internasional untuk menyatukan standar penanggalan Islam.

Peran lembaga-lembaga ini menjadi penting karena mereka tidak hanya memiliki kapasitas keilmuan dalam ilmu falak, tetapi juga jaringan dan otoritas untuk membentuk konsensus di antara berbagai mazhab dan negara. Keterlibatan aktif mereka dalam menyuarakan pentingnya kesatuan waktu ibadah akan memperkuat legitimasi dari sistem kalender Hijriah global yang disepakati.¹² Lebih dari itu, kolaborasi antarlembaga ini dapat menjadi model kepemimpinan umat Islam dalam menghadapi isu-isu kontemporer secara lebih terpadu dan solutif.

¹¹ Muhammad Arafat, "Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Kota Sorong Papua Barat," 2023.

¹² Susiknan Azhari, "Kalender Islam Global Jembatan Mempersatukan Umat" (Pictores Aeli Marcella Giulia Pace, 2024).

Dengan demikian, dukungan dan inisiatif dari institusi-institusi Islam besar bukan hanya memperkuat dimensi ilmiah dan teologis dari unifikasi kalender, tetapi juga menegaskan pentingnya kepemimpinan kolektif dalam membangun solidaritas umat di tengah tantangan global.

c. Kendala utama:

Salah satu tantangan paling mendasar dalam upaya unifikasi kalender Hijriah global adalah kuatnya otonomi keagamaan yang dimiliki masing-masing negara Muslim. Setiap negara memiliki otoritas keagamaan yang berwenang menetapkan awal bulan berdasarkan interpretasi dan metodologi yang dianggap sah secara lokal, baik melalui hisab, rukyat, atau kombinasi keduanya. Otoritas ini sering kali berakar kuat dalam konstitusi negara atau sistem hukum keagamaan nasional, sehingga keputusan dari otoritas global cenderung dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan keagamaan mereka.¹³ Selain itu, sentimen nasionalisme keagamaan juga memperkuat sikap mempertahankan sistem penanggalan masing-masing. Banyak negara menjadikan penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri sebagai simbol kedaulatan dan identitas religius nasional, yang secara politis memperkuat legitimasi pemerintah atau lembaga keagamaan lokal di mata rakyatnya. Misalnya, keputusan melihat hilal secara mandiri atau mengikuti kalender lokal sering kali disambut sebagai wujud independensi dan kemurnian tradisi keislaman di wilayah tersebut.

Kedua faktor ini—otonomi keagamaan dan nasionalisme simbolik—menciptakan hambatan struktural terhadap kesepakatan lintas negara, karena setiap pihak enggan melepaskan wewenang demi keseragaman global. Kendati begitu, kondisi ini tidak sepenuhnya menutup peluang integrasi. Justru, dengan membangun forum musyawarah internasional yang setara dan berbasis keilmuan, lembaga-lembaga keagamaan dapat diajak menyusun mekanisme unifikasi yang tetap menghormati kedaulatan masing-masing.¹⁴ Maka, kendala-kendala tersebut harus

¹³ AHMAD SYIFAUL ANAM, "DINAMIKA SIDANG ISBAT DI INDONESIA DARI TAHUN 1381 H-1441 H./1962 M-2020 M (Kajian Hukum, Siyasah Syari'yyah Dan Sejarah) DISERTASI," n.d.

¹⁴ Duski Samad, *Best Practice Tolerance: Praktek Toleransi Terbaik* (Pab Publishing, 2017).

dilihat sebagai tantangan yang menuntut pendekatan kolaboratif, bukan kompetitif, demi terwujudnya kesatuan umat dalam penanggulangan Islam global yang inklusif dan berkeadilan.

4. Kalender Hijriah sebagai Cermin Tantangan Islam Global Kontemporer

a. Islam kontemporer sebagai wacana yang plural

Kalender Hijriah, yang seharusnya menjadi penanda kesatuan umat dalam dimensi waktu keagamaan, justru mencerminkan kompleksitas realitas Islam kontemporer yang penuh dengan keragaman otoritas dan pendekatan. Berbeda dengan masa klasik ketika otoritas keislaman bersifat lebih terpusat, kondisi global saat ini memperlihatkan fragmentasi otoritas di berbagai belahan dunia Islam. Tidak ada satu institusi atau tokoh yang secara universal diakui sebagai penentu tunggal dalam hal keagamaan, termasuk dalam penetapan kalender Hijriah. Masing-masing negara, mazhab, bahkan organisasi keagamaan memiliki legitimasi dan metodologinya sendiri, yang memperkuat sifat pluralistik dalam diskursus Islam masa kini. Hal ini bukan hanya berpengaruh pada persoalan teknis penanggulangan, tetapi juga menunjukkan bahwa umat Islam hidup dalam konteks yang sangat beragam secara politik, budaya, dan epistemologis.¹⁵ Misalnya, perbedaan antara pendekatan astronomi modern di Turki dan pendekatan rukyat tradisional di sebagian negara Arab atau Asia Tenggara menjadi cerminan dari benturan antara tradisi dan modernitas, antara otoritas lokal dan tuntutan global.

Dengan demikian, perdebatan tentang unifikasi kalender Hijriah menjadi simbol dari tantangan yang lebih besar: bagaimana membangun kesepakatan dan solidaritas di tengah pluralitas pemahaman, kepentingan, dan identitas Islam. Kalender bukan lagi sekadar alat hitung waktu, tetapi mencerminkan dinamika kekuasaan, legitimasi, serta arah masa depan komunitas Muslim global. Oleh karena itu, menyelesaikan persoalan kalender Hijriah secara kolektif dapat menjadi langkah penting dalam menunjukkan bahwa Islam mampu menghadirkan harmoni dalam

¹⁵ Diana Nur Sholihah and Sahkholid Nasution, "Studi Islam Interdisipliner (Memotret Ilmu Pengetahuan Dan Sains Inklusif Dalam Islam)," 2015.

keberagaman, serta menjawab tantangan zaman dengan pendekatan inklusif dan dialogis.

- Perbedaan kalender sebagai simbol perpecahan atau dinamika sehat?

Perbedaan dalam penetapan kalender Hijriah, khususnya terkait awal Ramadhan dan Idul Fitri, dapat dimaknai dalam dua cara yang saling bertolak belakang: sebagai cerminan kekayaan intelektual dalam Islam atau sebagai cerminan lemahnya kohesi umat secara global. Di satu sisi, keragaman metode seperti hisab dan rukyat mencerminkan beragam ijihad yang berkembang dari berbagai tradisi keilmuan dan konteks sosial-politik umat Islam.¹⁶ Ini menunjukkan bahwa Islam membuka ruang bagi perbedaan pendapat selama didasarkan pada argumen yang sah dan niat yang ikhlas untuk mencari kebenaran.

Namun di sisi lain, perbedaan yang terus berulang setiap tahun juga menjadi ujian nyata bagi solidaritas umat Islam di tingkat global. Ketika hari raya tidak lagi dirayakan bersama dan umat terpecah secara waktu dan makna dalam momen-momen spiritual yang seharusnya menyatukan, maka perbedaan ini dapat memunculkan kesan disintegrasi simbolik yang memperlemah identitas kolektif. Sebagai contoh, ketika sebagian umat merayakan Idul Fitri sementara yang lain masih berpuasa, muncul pertanyaan tentang sejauh mana umat Islam mampu menunjukkan kebersamaan dalam hal-hal mendasar. Perbedaan ini, jika tidak dikelola dengan bijak, bisa berkembang menjadi perpecahan sosial dan bahkan politik.

Dengan demikian, perbedaan kalender harus dipahami bukan sekadar sebagai isu teknis atau akademik, melainkan sebagai refleksi dari dinamika keislaman kontemporer. Ia bisa menjadi ladang dialog yang sehat jika diiringi dengan sikap saling menghormati dan keinginan kuat untuk mencapai titik temu. Namun jika dibiarkan tanpa arah penyelesaian, ia berpotensi memperdalam jarak dan ketegangan antarumat Islam. Maka, tantangan ke depan bukan menghapus perbedaan

¹⁶ Ananto Isworo et al., "Tuntunan Tabligh," n.d.

sepenuhnya, tetapi membangun mekanisme kolektif untuk mengelolanya secara produktif dan menyatukan visi bersama umat global.

b. Peluang membangun titik temu

Di tengah kompleksitas perbedaan penetapan kalender Hijriah, tetap terbuka ruang optimistis untuk membangun titik temu yang konstruktif melalui pendekatan yang kolaboratif dan multidisipliner. Salah satu peluang utamanya adalah mengedepankan konsensus berbasis sains dan syariah, di mana para ahli astronomi, ulama fikih, dan perwakilan institusi keagamaan duduk bersama untuk merumuskan kriteria tunggal yang dapat diterima secara luas. Konsensus ilmiah ini dapat menjadi landasan bagi fatwa bersama lintas negara dan mazhab, yang tidak hanya sah secara keilmuan, tetapi juga memiliki kekuatan legitimasi di tengah umat. Fatwa kolektif yang disepakati dalam forum internasional seperti Majma' al-Fiqh al-Islami atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat menjadi titik awal untuk menyatukan praktik keagamaan lintas batas negara.¹⁷ Di samping itu, diplomasi keagamaan—yakni upaya dialog dan kerja sama antarnegara Muslim di bidang keagamaan—juga menjadi sarana penting dalam membangun kepercayaan dan solidaritas. Pendekatan ini telah mulai diupayakan dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi negara-negara Muslim, di mana kalender Hijriah menjadi salah satu agenda utama.

Dengan menggabungkan otoritas keilmuan dan kehendak politik keagamaan, umat Islam memiliki peluang besar untuk melangkah menuju unifikasi kalender yang tidak mengorbankan keragaman, tetapi justru merayakannya dalam bingkai kesepakatan bersama. Kesepakatan ini tidak hanya akan menyatukan umat dalam penentuan waktu ibadah, tetapi juga menjadi simbol kedewasaan umat Islam dalam menyikapi perbedaan dan mengelola dinamika global dengan semangat ukhuwah dan keilmuan. Maka, upaya mencari titik temu melalui jalur ilmiah, fatwa kolektif, dan diplomasi spiritual bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga mendesak untuk diwujudkan demi masa depan persatuan umat.

¹⁷ M Taufiq Rahman, *Agama Dan Politik Identitas Dalam Kerangka Sosial* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

KESIMPULAN

Perbedaan dalam penetapan hari raya Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha, merefleksikan lebih dari sekadar persoalan metode hisab atau rukyat; ia adalah cerminan langsung dari kompleksitas dan tantangan yang dihadapi umat Islam dalam konteks global kontemporer. Fragmentasi otoritas keagamaan, keragaman pendekatan epistemologis, hingga pengaruh geopolitik dan nasionalisme religius, semuanya berkontribusi pada sulitnya membangun keseragaman dalam hal yang seharusnya menjadi simbol persatuan. Upaya unifikasi kalender Hijriah tidak dapat dipandang hanya sebagai proyek teknis astronomi, melainkan sebagai proses kolektif lintas negara dan mazhab yang membutuhkan komitmen bersama, pendekatan ilmiah yang inklusif, serta semangat ukhuwah Islamiyah. Inisiatif ini menuntut partisipasi aktif institusi keagamaan besar, dukungan politik umat Islam, serta kesediaan untuk berdialog lintas batas demi membangun konsensus yang kokoh dan berkeadilan.

Dengan demikian, kalender Hijriah bukan sekadar sistem penanggalan, melainkan cermin dari kualitas koordinasi dan kematangan umat Islam dalam merespons tantangan global. Jalan unifikasi kalender Hijriah adalah cerminan dari cita-cita besar umat Islam untuk membangun solidaritas global yang nyata. Jika berhasil dicapai, ia bukan hanya menyatukan waktu ibadah, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif bahwa di tengah keragaman, umat Islam tetap bisa melangkah bersama menuju masa depan yang lebih bersatu, terorganisir, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Bashori, Co Promotor, and H Imam Yahya. "Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu." *Doctoral, Semarang, UIN Walisongo*, 2020.

ANAM, AHMAD SYIFAUL. "DINAMIKA SIDANG ISBAT DI INDONESIA DARI TAHUN 1381 H-1441 H./1962 M–2020 M (Kajian Hukum, Siyasa Syari'yyah Dan Sejarah) DISERTASI," n.d.

Arafat, Muhammad. "Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di Kota Sorong Papua Barat," 2023.

- Azhari, Susiknan. "Kalender Islam Global Jembatan Mempersatukan Umat." *Pictores Aeli* Marcella Giulia Pace, 2024.
- Fatimah, Anis, and S Pd Dewi. "Pandangan Muhammadiyah Dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri." IAIN Surakarta, 2020.
- Isworo, Ananto, S Ag Irwanto Muhammad Agung Riyanto, S T Muhammad Auda Fahreza, Muhamad Jaya Kelana, Tata Letak Humaidi Khair Nur'aini, and Puji Lestari. "Tuntunan Tabligh," n.d.
- Maimun, Maimun. "Rekonstruksi Konsep Ijmak Dalam Berijtihad Di Era Modern." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2018): 379376.
- Mu'ti, Abdul. "Toleransi Yang Otentik: Menghadirkan Nilai Kemanusiaan Dan Keterbukaan Dalam Beragama, Berpolitik Dan Peradaban Global," 2019.
- Mufid, Abdul. "Unifikasi Kalender Hijriah Internasional Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawi." *Hikmatuna* 5, no. 1 (2019): 71–83.
- Pengetahuan, Sumber. "Dinamika Rukyat Dan Hisab Dalam Penentuan Bulan Hijriah Menurut Muhammadiyah" 06, no. 3 (2024): 243–57.
- Rahman, M Taufiq. *Agama Dan Politik Identitas Dalam Kerangka Sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Samad, Duski. *Best Practice Tolerance: Praktek Toleransi Terbaik*. Pab Publishing, 2017.
- Sholihah, Diana Nur, and Sahkholid Nasution. "Studi Islam Interdisipliner (Memotret Ilmu Pengetahuan Dan Sains Inklusif Dalam Islam)," 2015.
- Suhanah, Suhanah. "Dampak Sosial Perbedaan Pendapat Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam Di Kota Semarang." *Harmoni* 11, no. 2 (2012): 156–68.